

**KEKERASAN KULTURAL TERHADAP PEREMPUAN DIKOREA
SELATAN PADA MASA PEMERINTAHAN MOON JAE IN
SKRIPSI**



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

AZZA RIZKIA

18323201

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**KEKERASAN KULTURAL TERHADAP PEREMPUAN DIKOREA
SELATAN PADA MASA PEMERINTAHAN MOON JAE IN SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

AZZA RIZKIA

18323201

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN
KEKERASAN KULTURAL TERHADAP PEREMPUAN DI
KOREA SELATAN PADA MASA PEMERINTAHAN MOON JAE IN

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

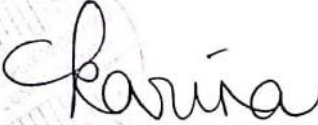
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi


(Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.)

- Dewan Penguji
- 1 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
 - 2 Gustri Eni Putri, S.I.P., M.A.
 - 3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int. M.A.

Tanda Tangan




PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Rabu, 12 April 2023

A 1000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) is shown. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "REPUBLIK INDONESIA", "1000", "METERAI TEMPEL", and the serial number "5D358AKX394265775". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Azza Rizkia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	8
DAFTAR TABEL	9
DAFTAR SINGKATAN.....	10
ABSTRAK	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Cakupan penelitian.....	8
1.5 Tinjauan Pustaka	10
1.6 Kerangka Pemikiran	14
Gambar 1: Segitiga Kekerasan Galtung.....	15
1.7 Argumen Sementara.....	19
1.8 Metode Penelitian.....	20
1.8.1 Jenis Penelitian	20
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	20
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	21
1.8.4 Proses Penelitian	21
1.9 Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KEKERASAN KULTURAL TERHADAP PEREMPUAN DI KOREA SELATAN DALAM ASPEK AGAMA DAN ASPEK IDEOLOGI PADA MASA PEMERINTAHAN MOON JAE-IN.....	23
2.1 Kekerasan Terhadap Perempuan di Korea Selatan Dalam Aspek Agama.....	23
Tabel I. Yang Terpilih dan Yang Tidak Terpilih dalam Aspek Agama.....	24
2.2 Kekerasan Terhadap Perempuan di Korea Selatan Dalam Aspek Ideologi.....	29
BAB III ASPEK SENI DAN ASPEK KOSMOLOGI DALAM KEKERASAN KULTURAL TERHADAP PEREMPUAN DI KOREA SELATAN PADA MASA PEMERINTAHAN MOON JAE-IN	34
3.1 Kekerasan Terhadap Perempuan di Korea Selatan Dalam Aspek Seni.....	34
3.2 Kekerasan Terhadap Perempuan di Korea Selatan Dalam Aspek Kosmologi.....	40

BAB IV PENUTUP	45
4.1. Kesimpulan.....	45
4.2 Rekomendasi	50
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)	8
Gambar 2: Segitiga Kekerasan Johan Galtung.....	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tabel Terpilih dan Tidak Terpilih dalam Aspek Agama 30

DAFTAR SINGKATAN

- UNDP : *United Nations Development Programme*
- UNODC : *United Nations Office on Drugs and Crime*
- OECD : *Organization for Economic Cooperation and Development*
- IPV : *Inactivated Polio Vaccine*

ABSTRAK

Isu kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu isu yang sering terjadi di Korea Selatan dimana adanya budaya patriarki yang berkembang dan masih mengakar di masyarakat menjadi awal mula terjadinya kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekerasan kultural terhadap perempuan di Korea Selatan pada masa pemerintahan Moon Jae In. Pada penelitian ini penulis menggunakan konsep Kekerasan Kultural John Galtung dalam meninjau kekerasan terhadap perempuan di Korea Selatan pada masa pemerintahan Moon Jae-In. Melalui teori ini penulis dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya isu kekerasandi Korea Selatan dengan menggunakan beberapa aspek yang relevan yaitu aspek agama, ideologi, seni dan kosmologi. Hasil dari penelitian ini adalah konsep kekerasan kultural menurut John Galtung berhasil menjawab rumusan masalah terkait kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di Korea Selatan karena budayapatriarki yang masih kuat di masyarakat. Budaya ini menganggap bahwa perempuan hanya sebagai objek yang harus patuh dan tunduk pada kehendak laki-laki, sehingga memicu terjadinya berbagai bentuk kekerasan.

Kata kunci: Kekerasan Kultural, Perempuan, Korea Selatan, Pemerintahan Moon Jae In

ABSTRACT

The issue of violence against women is one of the issues that often occurs in South Korea where there is a patriarchal culture that develops and is still rooted in society which is the origin of violence. This study aims to analyze cultural violence against women in South Korea during the reign of Moon Jae In. In this study the author uses John Galtung's concept of Cultural Violence in reviewing violence against women in South Korea during the reign of Moon Jae-In. Through this theory the author can identify the causes of the issue of violence in South Korea by using several relevant aspects, namely aspects of religion, ideology, art and cosmology. The result of this study is that the concept of cultural violence according to John Galtung has succeeded in answering the formulation of the problem related to violence that occurs against women in South Korea because of the patriarchal culture that is still strong in society. This culture considers women only as objects that must obey and submit to the will of men, thus triggering various forms of violence.

Keywords: *Cultural Violence, Women, South Korea, Moon Jae In Government*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Budaya paternalistik di Korea Selatan telah membagi gender secara diskriminatif dan struktural di Korea Selatan. Di mana, laki-laki lebih unggul dalam hierarki dan membatasi upaya pemberdayaan dan partisipasi perempuan di ruang publik. Bahkan pembagian peran dan tugas yang didasarkan atas gender telah mengakar kuat pada kehidupan sosial masyarakat. Sehingga, perempuan kerap kali menerima kekerasan kultural melalui pembagian peran dan tugas yang telah mengakar tersebut. Bahkan, salah satu kekerasan kultural yang diterima oleh perempuan di Korea Selatan adalah budaya minum setelah pulang kerja atau yang biasa disebut sebagai *hoesik*. Budaya *hoesik* ini dianggap akan menyulitkan perempuan untuk menjalankan peran domestik. Selain itu, perempuan Korea Selatan juga sangat rentan mengalami diskriminasi dan pelecehan di tempat bekerja. Salah satunya adalah, pertimbangan mengenai kehamilan yang dapat menunda promosi jabatan bagi perempuan setelah cuti hamil. Sehingga, berbagai hambatan kultural ini telah menjadi kekerasan yang saling berkontribusi terhadap penguatan ketidaksetaraan gender di Korea Selatan (Kardina dan Yurisa 2021, 156-162).

Berdasarkan *Global Gender Gap Report* pada tahun 2022 yang diterbitkan oleh *World Economic Forum*, Korea Selatan menempati urutan ke-199 dari 146 negara dalam peringkat kesenjangan gender. Di mana, urutan ini naik dari urutan 102 sebelumnya pada tahun 2021. Hal ini memperlihatkan keberhasilan Presiden Moon Jae In dalam mengatasi permasalahan kesetaraan gender di Korea Selatan semasa pemerintahannya. Hal ini juga didukung oleh transisi dari rezim otoritarian ke demokrasi pada tahun 1980 yang berkomitmen untuk menguatkan kesetaraan gender di Korea Selatan. Bahkan, pada masa kepemimpinan Presiden Moon Jae In tingkat partisipasi perempuan di tingkat pendidikan

meningkat pesat dan mencapai 71,33% atau 5% lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Maka, rezim pemerintahan yang berkuasa dapat menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kemajuan sektor kesetaraan gender. Penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti dikarenakan pada masa Presiden Moon Jae In terlihat peningkatan terhadap kesetaraan gender. Di mana sebelumnya, pada masa pemerintahan Park Geun-Hye sebagai Presiden Korea Selatan perempuan pertama memperlihatkan bagaimana negara ini dipimpin oleh 'presiden perempuan seperti tanpa perempuan'. Hal ini dikarenakan, Presiden Park gagal untuk memenuhi janji kampanye dalam menempatkan perempuan di posisi penting pemerintahan (Sartika 2023).

Kegagalan janji kampanye dan pemerintahan Presiden Park Geun-Hye dimanfaatkan oleh Presiden Moon Jae In dalam pemilu 2017 melalui janji kampanye, yaitu 'presiden feminis' untuk mempromosikan kebijakan kesetaraan gender. Di mana, selama masa pemerintahan Presiden Moon Jae In, ia telah menunjuk empat orang Menteri perempuan, salah satunya adalah Kang Kyung-Hwa sebagai Menteri Luar Negeri perempuan pertama di Korea Selatan. Sehingga, ini merupakan jumlah tertinggi kontribusi perempuan di kabinet sepanjang sejarah Korea Selatan. Bahkan, Presiden Moon menggunakan politisasi isu kesetaraan gender untuk mewujudkan janji kampanye. Di mana laki-laki diwajibkan untuk mengikuti wajib militer selama kurang lebih dua tahun dan perempuan memiliki banyak waktu untuk mengembangkan karir (Sartika 2023).

Namun janji kampanye sebagai presiden feminis tidak selaras dengan Data Kasus Kekerasan Seksual dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) sampai pada tahun 2019 kasus kekerasan seksual di Korea Selatan terus mengalami peningkatan di mana pada tahun 2019 menjadi 2.891 dan pada tahun 2020 mencapai 30.105 kekerasan seksual di Korea Selatan (Jung-Youn 2022).

Kemudian, UNDP (*United Nations Development Programme*) yang dirilis PBB pada tahun 2018, Korea Selatan menjadi negara yang konsisten menduduki ketimpangan gender tertinggi di dunia dengan indeks 0,063. Perbedaan gaji antara perempuan dan laki-laki di Korea Selatan yang menempati tingkat tertinggi. Dari data *Glass-Ceiling Index* kesenjangan gaji mencapai 35% dengan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki mencapai 79% dan angkatan kerja perempuan hanya 59% dimana hanya ada dua persen perusahaan yang mempekerjakan perempuan sebagai pemimpin dan satu dari 10 posisi manajerial dipegang oleh perempuan (Dayana 2019). Hal ini disebabkan oleh kebijakan Presiden Moon yang bias antara laki-laki dan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga. Di mana kebijakan ini telah “memperlakukan laki-laki sebagai penjahat (*treated men as potential criminals*) dan menghambat perkembangan karir laki-laki karena kebijakan wajib militer selama kurang lebih dua tahun.

Pada tahun 2018, Presiden Moon Jae In dalam pidatonya berjanji untuk menyoroti permasalahan penderitaan para wanita penghibur di Korea Selatan yang masih hidup dan berkaitan dengan kasus pemaksaan bekerja di rumah bordil pada masa perang Jepang. Pidato ini juga sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan perselisihan dengan negara Jepang mengenai permasalahan para wanita penghibur rumah bordil. Pidato ini merupakan peringatan ketiga peristiwa tersebut yang disampaikan oleh Presiden Moon di depan 100 orang aktivis, pejabat pemerintah di Kota Cheonan untuk mengenang para korban kekerasan seksual Jepang di masa perang.

Presiden Moon juga mengkritik kesepakatan *Victim Centrism* yang gagal memenuhi keinginan para penyintas. Kemudian, pada tahun 2021 Jepang membatasi ekspor mengenai bahan berteknologi tinggi ke Korea Selatan. Hal ini dikarenakan, pengadilan Korea Selatan menuntut pemerintah dan perusahaan Jepang untuk membayar

kompensasi kepada warga Korea Selatan yang dipaksa bekerja di rumah bordil selama perang. Tuntutan pembayaran kompensasi di masa pemerintahan Presiden Moon Jae In semakin memperburuk hubungan bilateral Korea Selatan dan Jepang. Namun, Presiden Moon berjanji untuk menyoroiti permasalahan tersebut (Kim 2020).

Pada tahun 2017, Moon Jae In terpilih sebagai Presiden kedua belas Korea Selatan yang liberal serta memiliki kepemimpinan yang visioner dan strategis (Reditya 2021). Ketika menjabat, Moon Jae In menekankan betapa pentingnya suara dan masukan dari masyarakat untuk menjalankan suatu pemerintahan. Hal ini mendorong masyarakat memberikan kepercayaan penuh terhadap Presiden Moon. Setelah resmi menjabat sebagai Presiden Korea Selatan, dalam kepemimpinannya Moon membuat beberapa kebijakan sekaligus juga mengalami tantangan untuk mengembalikan integritas negara di mata masyarakat internasional. Bahkan, Moon Jae In menggambarkan dirinya sebagai sosok presiden feminis. Serta, mendeklarasikan mengenai pembebasan feminis bagi kaum perempuan di Korea Selatan (Maharani 2022).

Selaras dengan deklarasi Presiden Moon Jae In, pernyataan Presiden Korea Selatan ini dalam acara *International Women's Day* ke-114 mendukung deklarasinya mengenai feminis. Presiden Moon Jae In mengungkapkan bahwa 'kondisi kesetaraan gender di Korea Selatan lemah, jika dibandingkan dengan perkembangan negara, sehingga pemerintah harus mengembangkan hal tersebut'. Presiden Moon juga menyampaikan dorongan dalam acara *International Women's Day* tersebut bahwa, suara keberanian para pekerja perempuan yang menyuarakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lalu terus berlanjut hingga hari ini. Ditambah lagi, saat kesetaraan gender telah tercapai di masyarakat, maka perempuan dan laki-laki akan memiliki masa depan yang berkelanjutan.

Selain itu, di akun sosial media Moon Jae In, Presiden Moon mengatakan bahwa ‘diskriminasi yang tidak terlihat/*glass ceiling* bagi kalangan perempuan dan struktur budaya yang menghalangi kesetaraan gender terus ada di mana-mana’. Maka, pemerintah telah membuat kemajuan besar untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti pemerintah Korea Selatan telah merevisi *The Law on Women who Interfere with Career* atau *Glass Ceiling in Korean Civil Service*. Kemudian, memberlakukan *Anti-Stalking Law* hingga memperkuat hukuman bagi kejahatan seks digital untuk membangun sistem tanggap yang kuat dalam menghadapi kekerasan gender (KBS World Indonesian 2022).

Kekerasan kultural menurut Galtung yaitu, sikap yang berlaku dan keyakinan seseorang terhadap hal-hal yang telah diajarkan sejak kecil dan mengelilingi kehidupan seseorang dalam kesehariannya mengenai kekuasaan dan kebutuhan. Selain itu, Galtung mengklaim bahwa, patriarki sebagai kekerasan kultural yang menyebabkan dikotomi antara peran publik dan privat, serta membentuk relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Sehingga, perempuan merupakan objek utama bagi penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Patriarki sebagai kekerasan kultural membentuk sikap dan keyakinan dalam kehidupan sehari-hari mengenai kekuasaan. Kekerasan kultural berjalan dengan cara mengubah warna moral suatu aksi menjadi diterima dalam masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan (Eriyanti 2017).

Pemaparan ini memperlihatkan bahwa, kasus kesetaraan gender di Korea Selatan dilihat melalui sistem politik demokrasi yang ikut atau tidak berkontribusi untuk membuat negara adil gender. Bahkan, lingkungan domestic hingga budaya masyarakat berperan kuat dalam kemajuan di sektor kesetaraan gender tersebut. Maka, permasalahan kekerasan kultural yang dialami oleh masyarakat Korea Selatan cenderung naik turun dalam mengatasinya, tergantung dari rezim pemerintahan, komitmen, dan pilar kebijakan yang diterapkan. Sudah seharusnya, penyelesaian permasalahan kekerasan kultural menjadi

agenda setiap rezim untuk menguntungkan konsolidasi demokrasi dan keberlanjutan pertumbuhan perekonomian Korea Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa kekerasan kultural terhadap perempuan di Korea Selatan masih terjadi pada masa pemerintahan Moon Jae In?

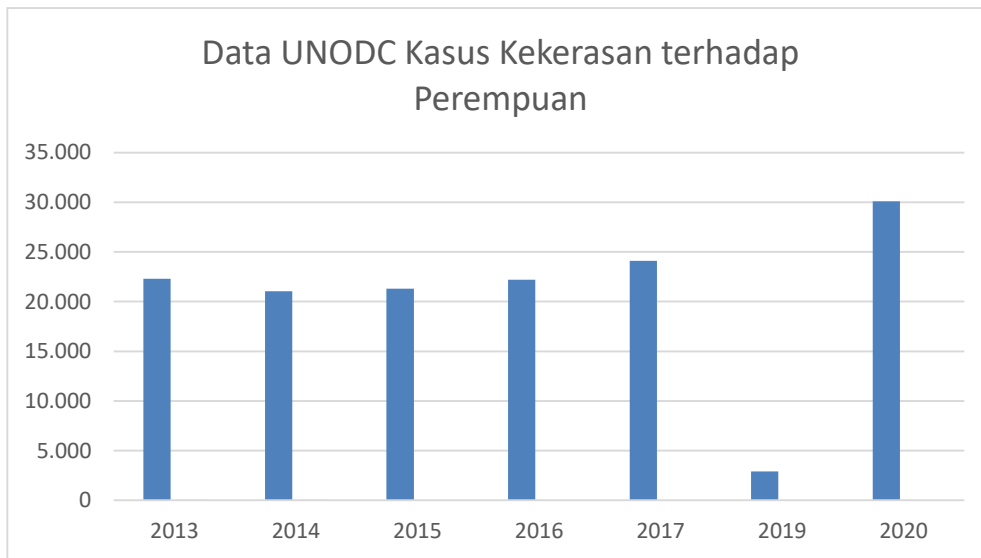
1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana kekerasan kultural dapat terjadi pada perempuan di Korea Selatan.
2. Untuk mengetahui bentuk atau aspek yang menjadi pendorong kekerasan kultural itu sendiri terhadap perempuan di Korea Selatan pada masa pemerintahan Moon Jae In. Di mana dalam hal ini tidak hanya disebabkan oleh kekerasan kultural namun disebabkan juga karena adanya kekerasan secara langsung dan tidak langsung serta kekerasan struktural. Sehingga dengan adanya penelitian ini semoga dapat menjawab rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis.

1.4 Cakupan penelitian

Melihat Korea Selatan yang dapat dikatakan sebagai negara maju, tetapi tidak sejalan dengan pembangunan perempuannya. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada kekerasan kultural yang dihadapi oleh perempuan di Korea Selatan pada masa Pemerintahan Moon Jae-In tahun 2017-2022 karena kasus kekerasan terhadap perempuan di Korea Selatan ini dari dahulu pada masa pemerintahan Park Geun-hye kasusnya sempat naik turun kemudian pada masa Moon Jae-In kasusnya masih terus meningkat setiap tahunnya.



Sumber : (UNODC n.d.)

Menurut data kasus kekerasan terhadap perempuan dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) tahun 2013 pada masa ParkGeun-hye kasus kekerasan seksual di Korea Selatan meningkat menjadi 22.310 kasus, pada tahun 2014 mengalami penurunan dengan angka 21.055 dan pada tahun 2015 sampai 2020 kasus kekerasan seksual di Korea Selatan terus mengalami peningkatan di mana pada tahun 2015 mencapai 21.286 kasus, pada tahun 2016 meningkat menjadi 22.200 dan pada tahun 2017 mencapai 24.110 kasus (UNODC n.d.) pada tahun 2019 menjadi 2.891 dan pada tahun 2020 mencapai 30.105 kekerasan seksual di Korea Selatan (Jung-Youn 2022). Penulis juga melihat bahwasannya Korea Selatan sebagai negara maju, namun masih

memiliki sistem patrilinear dan masih kuatnya ajaran konfusianisme yang ada di masyarakat membuat ajaran ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Korea dalam berbagai aspek kehidupan. Selain ajaran konfusianisme yang masih mengakar di masyarakat, budaya patriarki di Korea Selatan pun masih sangat tinggi. Hal ini membuat perempuan di Korea Selatan mendapatkan perlakuan diskriminasi, termarjinalkan dan selalu dianggap rendah serta kerap sekali mendapatkan perlakuan kekerasan secara langsung ataupun kekerasan secara tidak langsung baik itu di ranah privat maupun publik.

Dalam penelitian ini penulis memilih pemerintahan Moon Jae In yang masih menjabat sebagai Presiden Korea Selatan hingga sekarang untuk membatasi waktu penelitian. Karena pada masa pemerintahan Moon Jae In penulis melihat fenomena kekerasan yang berbasis budaya terhadap perempuan di Korea Selatan dan penulis melihat bahwasannya walaupun pada masa Moon Jae In yang Pro feminis dan beberapa kebijakannya yang merevisi UU terkait perlindungan terhadap perempuan, namun kasus kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi dan terus meningkat berdasarkan data-data dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Hal ini terjadi karena masih mengakarnya budaya patriarki dan ajaran konfusianisme yang ada di Korea Selatan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam jurnal yang berjudul *An analysis of women victims of sexual violence in one area in Republic of Korea* oleh Gyeong-Eun Heo, Jae Hoong Sang, Tae-Hee Kim dan Hae Hyeog Lee yang menganalisis tentang karakteristik kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di salah satu wilayah di Republik Korea di mana dalam jurnal tersebut penulis menganalisis melalui rekam medis dari salah satu rumah sakit universitas tersier oleh dokter kandungan dan ginekolog. Terdapat 332 wanita yang mengunjungi unit gawat darurat dengan keluhan utama mengalami kekerasan seksual sebagian besar korban yang mengalami hal ini remaja berusia 13-20 tahun dan dewasa yang berumur di atas 20 tahun. Untuk menyelidiki kekerasan seksual ini rumah sakit merawat korban kekerasan seksual untuk melihat terkait karakteristik korban kekerasan dan penyebab terjadinya kekerasan itu sendiri serta akibat secara medis maupun psikologis yang didapatkan para korban setelah mengalami kekerasan seksual (Heo, Sang and Kim 2022, 2-9). Sehingga penelitian ini cukup membantu penulis dalam

memberikan beberapa referensi dan gambaran terkait kekerasan seksual yang dilihat dari kacamata medis dan dampaknya terhadap perempuan.

Jurnal kedua yang berjudul *Prevalence and Trends in Domestic Violence in South Korea: Findings from National Surveys* oleh Jae Yop Kim, Seun Oh dan Seok In Nam menjelaskan mengenai kelaziman tren kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan sejak tahun 1997 dan menganalisis karakteristik sosio-demografis pelaku yang berkontribusi terhadap kekerasan pasangan di mana dalam kurun waktu tertentu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan resiko tersebut. Penulis dalam penelitian ini menggunakan survei nasional kekerasan dalam rumah tangga tahun 1999 dan tahun 2010 dengan analisis frekuensi untuk mengukur prevalensi kekerasan pasangan intim (IPV) di mana dalam analisis ini terdapat penurunan sekitar 50% dan analisis regresi logistik, korelasi dan tabulasi silang yang digunakan untuk mencari faktor resiko sosio-demografis dari kekerasan fisik pasangan dan pola perubahan dari waktu ke waktu yang menunjukkan bahwasanya laki-laki dengan karakteristik sosio-demografisnya rendah umumnya lebih kejam dan wanita yang lebih muda tampak lebih kejam dari wanita yang lebih tua. Budaya patriarki pun membawa pengaruh terhadap perempuan di Asia yang cenderung tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap pasangan laki-laki di mana dalam survei nasional tahun 2010 hanya 3,1% rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh perempuan (Kim, Oh and Nam 2016, 1555-1573). Sehingga jurnal ini cukup memberikan referensi dan gambaran mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan data-data terkait jumlah kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga di Korea Selatan.

Jurnal ketiga oleh Chiyong Cha dan Mi-ran Lee dengan judul *Healing From Sexual Violence Among Young Women In South Korea* membahas mengenai proses penyembuhan wanita muda di Korea Selatan dari kekerasan seksual di mana dalam hal

ini laporan kekerasan seksual terhadap perempuan muda semakin meningkat. Perempuan muda di Korea Selatan yang mengalami kekerasan mengalami kesulitan dalam proses penyembuhannya yang, hal ini berdampak pada konsekuensi jangka panjang baik untuk individu itu sendiri ataupun kepada masyarakat. Dalam jurnal ini penulis menganalisis menggunakan *Grounded theory* yang dikombinasikan dengan pendekatan Photovoice di mana pendekatan ini dilakukan untuk mengeksplorasi pengalaman penyembuhan terhadap kekerasan seksual mencakup kemarahan internal, memutuskan koneksi, mencapai titik balik dengan dukungan, memulihkan koneksi, berjuang melalui proses internal individu, dan mengubah kekerasan seksual menjadi batu loncatan di mana proses penyembuhan ini menunjukkan kesamaan aspek budaya dan usia tertentu dari pengalaman kekerasan seksual di kalangan perempuan muda serta dengan *grounded theory* ini menghadirkan perspektif baru tentang penyembuhan yang berkaitan dengan masa lalu (Lee 2021, 2-11). Sehingga dalam jurnal ini memberikan gambaran terhadap penulis terkait dampak dari kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan muda di Korea Selatan.

Penelitian selanjutnya ialah terdapat jurnal yang berjudul Meninjau Keberhasilan Moon Jae In sebagai Presiden Korea Selatan yang ditulis oleh Anggih Maharani. Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang kepemimpinan Moon Jae In sebagai Presiden Korea Selatan yang ke 12, yang memiliki gaya kepemimpinan yang strategis dan visioner sehingga mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. Selama menjabat sebagai Presiden Moon JaeIn membuat beberapa kebijakan-kebijakan seperti kebijakan luar negeri mengenai perdamaian dengan Korea Utara, kebijakan *New Southern Policy* dan kebijakan dalam menangani kasus Covid-19. Presiden Moon Jae In sebagai pemimpin yang mendeklarasikan mengenai feminisme bagi kaum perempuan di Korea Selatan in tidak membuat kebijakan yang cukup serius terkait

kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Korea Selatan di mana seperti kita ketahui bahwasannya kasus kekerasan terhadap perempuan di Korea Selatan masih sangat tinggi (Anggih 2022, 4-14). Sehingga penelitian ini dapat membantu penulis dalam memahami kebijakan-kebijakan yang dilakukan Presiden Moon Jae In dan jurnal ini dapat berkontribusi terhadap literature penulis sebagai salah satu referensi atau sebagai acuan untuk memfokuskan penelitian selanjutnya terkait kekerasan terhadap perempuan di Korea Selatan.

Pada penelitian selanjutnya terdapat jurnal yang berjudul *Patriarchy in Korean Society: Substance and Appearance of Power* yang ditulis oleh Boon Jin Park di mana jurnal ini membahas mengenai budaya patriarki yang ada di Korea. Jurnal ini menjelaskan kebudayaan tradisional patriarki di Korea yang masih dipertahankan dan diterapkan hingga saat ini dalam berbagai aspek khususnya keluarga karena keluarga sebagai unit dasar atau unit yang paling utama dalam tatanan sosial, karena dari lingkup terkecil ini penulis dapat menganalisis salah satu karakteristik budaya keluarga Korea dan mengungkapkan bagaimana sistem patriarki itu berubah, kekuatan patriarki itu digunakan dalam urusan pribadi atau dalam kehidupan rumah tangga seperti pembagian tugas dalam mengurus anak dan rumah serta urusan lainnya, dan bagaimana hubungan keluarga itu dapat terpengaruh. Dalam jurnalnya penulis juga memberikan data-data terkait gambaran tentang ayah atau suami mereka yang dilakukan melalui survei dan penyebaran kuesioner kepada anak-anak dan wanita yang sudah menikah dan belum menikah (Park n.d.). Sehingga penelitian ini dapat membantu penulis dalam memahami mengenai budaya patriarki yang ada di keluarga Korea dan jurnal ini dapat berkontribusi terhadap literature penulis sebagai salah satu referensi atau sebagai acuan penulis dalam memberikan data-data terkait budaya patriarki Korea khususnya dalam lingkup keluarga.

Berdasarkan beberapa uraian penelitian yang telah dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa tinjauan pustaka tersebut membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan yang masih cukup luas di berbagai aspek kehidupan seperti dalam rumah tangga, di keluarga dan budaya di masyarakat. Salah satu jurnal di atas pun membahas mengenai dampak yang dirasakan dari korban kekerasan seksual sendiri baik secara fisik atau mental dari setiap korban yang mengalami kekerasan. Dalam hal ini jurnal di atas dapat memberikan referensi atau literature dan gambaran kepada penulis. Sehingga penulis akan lebih berfokus pada bagaimana kekerasan terhadap perempuan di Korea Selatan terjadi khususnya pada kekerasan kultural yang terjadi pada perempuan di Korea Selatan hingga saat ini dan dengan penelitian yang dilakukan penulis nantinya dapat melengkapi tulisan-tulisan sebelumnya terkait kekerasan itu sendiri.

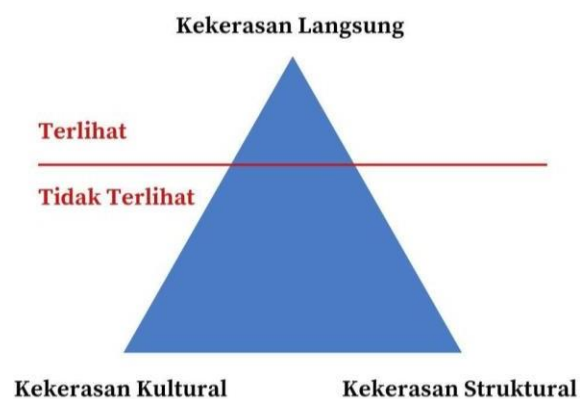
1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan sebuah penelitian pasti diperlukan suatu kerangka pemikiran, teori atau konsep yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep terkait kekerasan kultural Johan Galtung karena konsep ini relevan dan dengan menggunakan pendekatan atau konsep ini penulis dapat menganalisis terkait kekerasan kultural terhadap perempuan di Korea Selatan pada masa pemerintahan Moon Jae-In. Di mana Galtung membagi kekerasan ke dalam tiga bentuk dengan nama lain segitiga kekerasan yaitu kekerasan langsung, kekerasan kultural dan kekerasan struktural. Kekerasan langsung merupakan sebuah peristiwa atau bentuk tindakan fisik yang dapat melukai. Kekerasan struktural merupakan suatu efek yang ditimbulkan dari adanya sistem sosial, politik dan ekonomi yang mendiskriminasi dan membuat adanya kesenjangan. Sedangkan kekerasan kultural merupakan kekerasan permanen dengan adanya

pemanfaatan nilai-nilai budaya sebagai alasan dari tindakan kekerasan langsung dan kekerasan struktural (AR 2008, 15-17).

Peneliti hanya membahas mengenai kekerasan kultural dan tidak membahas mengenai kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Hal ini dikarenakan, kekerasan kultural merupakan pendorong utama yang menyebabkan terjadi kekerasan langsung dan struktural. Di mana, kekerasan langsung yang berupa tindakan fisik tidak akan terselesaikan dengan baik oleh suatu pemerintah negara apabila penyebab dari kekerasan langsung, yaitu kekerasan struktural tidak terselesaikan terlebih dahulu. Sehingga, peneliti ingin berfokus dalam pembahasan kultural sebagai sikap yang berlaku dan juga keyakinan suatu masyarakat yang telah diamalkan sejak kecil, maka ketika kekerasan struktural (perubahan sudut pandang masyarakat terhadap budaya) dapat terselesaikan, secara tidak langsung ini juga akan menyelesaikan permasalahan kekerasan langsung dan struktural yang akar penyebabnya berasal dari kekerasan kultural. Ketiga kekerasan ini digambarkan dalam sebuah bentuk segitiga kekerasan sesuai tingkatannya yaitu seperti gambar berikut:

Gambar 1: Segitiga Kekerasan Galtung



Sumber: Cultural Violence (Galtung 1990,294).

Pada gambar segitiga kekerasan di atas menjelaskan tiga bentuk kekerasan yang saling berhubungan. Namun, dari ketiga konsep kekerasan tersebut terdapat perbedaan mendasar dalam 'hubungan waktu' yang mana pada kekerasan langsung; adalah sebuah peristiwa, kekerasan struktural; merupakan proses dengan pasang surut dan kekerasan kultural ialah sesuatu yang sudah ada sejak lama. Jika melihat pada gambar, kekerasan langsung dapat dikelompokkan pada kekerasan yang terlihat sedangkan kekerasan kultural dan kekerasan struktural dapat dikelompokkan pada kekerasan yang tidak terlihat. Di mana kekerasan kultural ini dapat menjadi pendorong terjadinya kekerasan struktural dan bahkan kekerasan langsung. Hal ini menjadi pemicu karena adanya bentuk kekerasan kultural yang terus berkembang di masyarakat (Galtung 1990, 296-299).

Dalam tulisan Galtung yang berjudul *Cultural Violence* (1990) membahas mengenai kekerasan kultural, menurut Galtung dalam membahas budaya bukan merupakan wujud dari budaya secara keseluruhan melainkan membahas mengenai aspek-aspek yang ada di dalam budaya itu sendiri. Dalam hal ini terdapat beberapa aspek yang memicu terjadinya kekerasan kultural yaitu seperti ideologi, bahasa, agama, seni, ilmu pengetahuan empiris, ilmu formal dan kosmologi di mana aspek-aspek ini dapat membenarkan kekerasan langsung dan kekerasan struktural (Galtung 1990, 291-294).

Beberapa aspek seperti yang sudah disebutkan yaitu: Pertama, aspek agama di mana dalam ajaran agama sendiri yang bentuknya sakral masih menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Kedua, aspek ideologi dalam hal ini cara berpikir seseorang atau pandangan hidup seseorang yang dapat dipengaruhi. Ketiga, aspek bahasa di mana bahasa ini merupakan alat komunikasi sehari-hari namun dalam hal ini bahasa digunakan untuk mendiskriminasi kelompok tertentu dalam bentuk ucapan atau lisan. Keempat

yaitu seni di mana dalam hal ini terdapat suatu karya yang menggambarkan suatu kelompok tertentu yang dapat menjadi pemicu dalam kekerasan karena karya tersebut dianggap menggambarkan sesuatu kelompok atau ras tertentu secara negative. Kelima, aspek ilmu pengetahuan empiris yaitu adanya doktrin ekonomi di mana dalam ilmu empiris di sini lebih mengamati lika-liku ekonomi yang berkaitan dengan negara. Dan keenam ilmu formal sendiri seperti ilmu matematika atau ilmu yang berdasarkan kesimpulan secara logis. Selanjutnya yang ketujuh ialah kosmologi yang memandang dan menentukan sesuatu dapat terjadi karena suatu hal yang normal dan sebuah proses yang alami (Galtung 1990, 296-301).

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menggunakan kerangka pemikiran tersebut, di mana dengan menggunakan kerangka pemikiran ini dapat menjelaskan terkait bagaimana kekerasan itu bisa terjadi pada perempuan di Korea Selatan dan untuk melihat bagaimana bentuk kekerasan kultural itu dapat terjadi pada perempuan di Korea Selatan. Dalam hal ini penulis menggunakan atau mengambil beberapa aspek yang relevan dengan penjelasan Galtung yaitu aspek agama, ideologi, seni dan kosmologi. Di mana pada aspek agama dan ideologi seperti yang kita tahu bahwasannya pada masa lalu Korea Selatan memiliki tiga pilar keagamaan Korea yaitu Konfusianisme, Buddha dan Taoisme atau agama Kristen (Korean Cultural Center 2011). Konfusianisme menjadi salah satu ajaran atau agama yang sudah mengakar di Korea Selatan yang mempengaruhi nilai dan norma masyarakat dalam hubungan sosial, politik atau bahkan pandangan hidup setiap individu. Konfusianisme ini sebagai ideologi yang dianggap suci dan diikuti oleh ajaran utama dari system yang sudah diciptakan sehingga ajaran ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan perempuan sebagai kaum yang ter subordinasi karena adanya ajaran konfusianisme.

Pada aspek seni terdapat suatu karya yang menggambarkan suatu kelompok tertentu yang dapat menjadi pemicu dalam kekerasan. Yang mana dalam hal ini terdapat suatu karya seperti buku dan film yang membahas atau menceritakan terkait kekerasan atau perlakuan tidak adil yang dialami perempuan di Korea Selatan. Kemudian pada aspek kosmologi yang terjadi secara alami atau sudah terjadi turun menurun terkait pembenaran dan menormalisasi bahwasannya perempuan di Korea Selatan merupakan subkelas kedua atau hanya dianggap sebagai objek seksual karena adanya sistem patriarki yang membuat standar ganda dalam masyarakat secara tidak langsung yang membuat posisi perempuan selalu lebih rendah dibandingkan laki-laki. Namun, dalam aspek bahasa dan ilmu pengetahuan empiris dan formal sejauh penelitian yang penulis lakukan belum ditemukan data-data yang relevan karena dalam aspek bahasa masyarakat Korea Selatan dalam menggunakan bahasa sehari-hari terdapat perbedaan dalam berbicara pada orang yang lebih tua dan berbicara dengan orang yang lebih muda atau dengan orang yang seumuran.

Dari ketujuh aspek kekerasan kultural, terdapat tiga aspek yang tidak relevan dengan penelitian, yaitu aspek Bahasa, aspek Ilmu Pengetahuan Empiris, dan Aspek Ilmu Formal. Hal ini dikarenakan, dalam aspek Bahasa terdapat perbedaan berbicara yang jarang sekali mendorong terjadinya tindakan kekerasan. Di Korea Selatan sendiri, perbedaan berbicara dengan menggunakan Bahasa formal hanya digunakan untuk seseorang yang lebih tua atau yang belum dikenal, atau berbicara non-formal dengan orang yang lebih muda atau seumuran. Sehingga, aspek ini tidak mendorong terjadinya tindak kekerasan karena budaya masyarakat Korea Selatan mengenai penggunaan Bahasa formal dan non-formal telah menempati posisi masing-masing untuk setiap penggunaan Bahasa dan jenis masyarakatnya. Kemudian, aspek ilmu pengetahuan empiris dan ilmu empiris yang tidak tergolong dalam kategori yang tidak

relevan dikarenakan aspek ini membahas mengenai lika-liku perekonomian yang berkaitan dengan negara. Sedangkan, peningkatan dan penurunan perekonomian tidak mempengaruhi tindak kekerasan di Korea Selatan. Bahkan, ketika Korea Selatan dikenal dengan perekonomian yang berkembang pesat, tetap saja tindak kekerasan yang terjadi di negara tersebut masih tinggi. Melalui pemaparan ini, maka dalam penelitian ini penulis hanya akan menggunakan aspek Ideologi, aspek Agama, aspek Seni, dan aspek Kosmologi yang relevan.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis sampaikan, penulis memiliki argument sementara dari rumusan masalah terkait bagaimana bentuk kekerasan kultural terhadap perempuan di Korea Selatan pada masa Moon Jae In ini ialah terdapat beberapa aspek yang memicu terjadinya kekerasan kultural menurut Galtung pada perempuan di Korea Selatan. Beberapa aspek kekerasan kultural ini dapat dilihat dari aspek agama, ideologi, seni dan kosmologi. Dalam aspek agama di mana adanya ajaran konfusianisme yang sudah mengakar di Korea Selatan dan masih diterapkan hingga saat ini. Menurut ajaran konfusianisme perempuan itu suci sehingga membuat pergerakan hak-hak perempuan sangat terbatas baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Dalam aspek ideologi menurut Galtung dengan adanya perbedaan ideologi dapat menciptakan kekerasan di mana dalam hal ini adanya budaya patriarki yang masih mengakar di Korea Selatan yang mendiskriminasi perempuan sehingga menciptakan kekerasan terhadap perempuan. Kemudian perempuan dalam aspek seni ialah adanya standar kecantikan terhadap perempuan di Korea Selatan dalam industri hiburan seperti music dan film. Di mana dengan maraknya industri hiburan di Korea Selatan kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Korea Selatan semakin tinggi. Kemudian yang

terakhir ialah pada aspek kosmologi bahwasannya dengan adanya sistem patrilineal dan budaya patriarki yang ada di Korea Selatan yang sudah turun temurun hinggasekarang, membuat perempuan hanya sebagai suatu objek seksual bagi laki-laki dan perempuan selalu dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian tentang riset atau cara yang digunakan untuk mengeksplorasi atau menjawab suatu masalah yang bersifat deskriptif analisis. Bentuk data penelitian pada pendekatan kualitatif berupa kalimat atau narasi yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data kualitatif. Pada penelitian kualitatif memiliki strategi-strategi yang bersifat interaktif dan lebih fleksibel yang mana hal ini dilakukan untuk mengkaji perspektif dari sudut pandang partisipan dan penelitian ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial (Ismail Suardi Wekke 2019).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini subjeknya adalah kekerasan kultural pada masa pemerintahan Moon Jae In dan objeknya ialah perempuan di Korea Selatan. Jenis kekerasan kultural yang akan dibahas dalam penelitian ini, meliputi diskriminasi gender, tindakan rasisme, seksisme, dan eksploitasi. Di mana, seluruh jenis kekerasan kultural itu kerap kali dialami oleh perempuan Korea Selatan. Sehingga, budaya patriarki mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat di Korea Selatan yang mendorong peran dan posisi perempuan menjadi ter-subordinasi di bawah laki-laki.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan studi literatur. Dimana studi literatur ini merupakan data sekunder seperti jurnal, buku, berita dan website-website resmi lainnya terkait kekerasan terhadap perempuan di Korea Selatan, yang kemudian data-data sekunder ini dielaborasi untuk mendukung analisis penulis.

1.8.4 Proses Penelitian

Pada proses penelitian ini terdiri dari beberapa proses yang pertama ialah penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh dan hasil penelitian ini diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah, pendekatan dan fokus penelitiannya. Setelah itu, pembahasan ini dibagi menjadi beberapa sub bahasan dimana per-sub-babnya dipisah menjadi sub bahasan tersendiri dan akan dijelaskan serta dikembangkan seperti menyusun kerangka pemikiran, tujuan dan rancangan penelitian. Sehingga dapat menghasilkan pembahasan dan analisis mengenai studikasus yang sedang diteliti.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada bab ini untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan menguraikan pembahasan suatu masalah dalam skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada bab pertama berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara dan metode penelitian yang dibagi menjadi beberapa sub-bab yaitu jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data dan proses penelitian.

Pada bab dua penulis akan menjelaskan tentang Kekerasan Kultural terhadap Perempuan di Korea Selatan dalam Aspek Agama dan Aspek Ideologi Pada Masa Pemerintahan Moon Jae In yang dibagi menjadi dua sub bab yaitu sub bab pertama membahas terkait Analisis Kekerasan Terhadap Perempuan di Korea Selatan Dalam Aspek Agama dan sub bab kedua membahas terkait Analisis Kekerasan Terhadap Perempuan di Korea Selatan Dalam Aspek Ideologi.

Pada bab tiga penulis akan menjelaskan terkait Analisis Aspek Seni dan Aspek Kosmologi dalam Kekerasan Kultural terhadap Perempuan di Korea Selatan Pada Masa Pemerintahan Moon Jae-In yang dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas terkait Analisis Kekerasan Terhadap Perempuan di Korea Selatan Dalam Aspek Seni dan sub bab kedua membahas Analisis Kekerasan Terhadap Perempuan di Korea Selatan Dalam Aspek Kosmologi.

Pada bab selanjutnya atau bab empat yang berisi mengenai kesimpulan atau inti dari analisis secara keseluruhan yang telah dilakukan oleh penulis.

BAB II

KEKERASAN KULTURAL TERHADAP PEREMPUAN DI KOREA SELATAN DALAM ASPEK AGAMA DAN ASPEK IDEOLOGI PADA MASA PEMERINTAHAN MOON JAE-IN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana kekerasan kultural terhadap perempuan di Korea Selatan pada masa pemerintahan Moon Jae-In terjadi, menggunakan teori kekerasan kultural John Galtung yang dilihat dari aspek agama dan ideologi. Korea Selatan merupakan negara maju yang memiliki kekuatan ekonomi dan teknologi yang sangat pesat. Akan tetapi dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak sejalan dengan pembangunan perempuannya. Perempuan di Korea Selatan masih dianggap sebagai subkelas kedua dan perempuan masih dilihat atau dianggap sebagai makhluk yang lebih rendah dan lemah. Hal ini membuat perempuan di Korea Selatan mengalami tindak kekerasan baik itu di ranah private maupun publik (Kardina dan Yurisa 2021, 156-158)

2.1 Kekerasan Terhadap Perempuan di Korea Selatan Dalam Aspek Agama

Menurut Galtung dalam jurnalnya yang berjudul Cultural Violence (1990) agama merupakan salah satu aspek dalam kekerasan kultural. Dalam hal ini, ajaran agama digunakan untuk hal-hal yang benar atau salah di mana hal-hal yang baik ini berasal dari Tuhan dan hal-hal yang buruk atau salah berasal dari setan. Kemudian dalam hal ini jika ajaran agama diterapkan atau diimplementasikan ke dalam suatu hal yang salah maka dari penjelasan Galtung dapat dipahami bahwasannya hal tersebut merupakan adanya bentuk kekerasan kultural (Galtung 1990, 298-301).

Selanjutnya dalam tulisan Galtung terdapat tabel yang menjelaskan terkaithal yang terpilih dan yang tidak terpilih. Berikut tabel terpilih dan tidak terpilih:

Tabel I. Yang Terpilih dan Yang Tidak Terpilih dalam Aspek Agama

Pilihan Tuhan	Bagian Setan	Konsekuensinya
Manusia	Binatang, Tumbuhan, Alam	Ekosida, Spesiesme
Laki-laki	Wanita	Seksisme, Pembakaran tukang sihir
Umatnya	Umat lainnya	Nasionalisme, Imperialisme
Kulit putih	Berwarna	Rasisme, Kolonialisme
Kelas atas	Kelas bawah	Eksplorasi, Klasisme
Kepercayaan yang benar	Aliran sesat atau kafir	Meritisme, Inkuisisi

Sumber: Cultural Violence (Galtung 1990, 297)

Berdasarkan tabel di atas yang terpilih ialah berasal dari Tuhan dan yang tidak terpilih berasal dari setan di mana keduanya memiliki konsekuensinya masing-masing. Yang terpilih adalah manusia, laki-laki, umatnya, kulit putih, kelas atas dan kepercayaan yang benar sedangkan yang tidak terpilih adalah hewan, tumbuhan, alam, wanita, umat lain, berwarna, kelas bawah dan aliran sesat/kafir. Kemudian hal ini yang menyebabkan terjadinya tindakan rasisme, seksisme, klasisme, kolonialisme, diskriminasi kelas dan eksploitasi (Galtung 1990, 297). Selain itu, Galtung juga melegitimasi bahwasannya kekerasan kultural dapat terjadi karena ada kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Korea

Selatan sebagai negara maju dengan jumlah penduduk kurang lebih 51 jiwa dengan berbagai macam agama baik itu agama tradisional seperti Perdukunan, Buddhisme, Taoisme, Konfusianisme atau agama modern seperti Kristen, Katolik, Protestan dan yang lainnya. Korea Selatan tidak memiliki agama resmi seperti negara-negara lain di dunia, warga negara Korea Selatan diberikan kebebasan dalam memeluk agama apapun dan dijamin oleh konstitusi Korea. Namun, dengan beragamnya agama yang ada di Korea Selatan mayoritas penduduk Korea Selatan menganut agama Kristen dengan persentase 29,4% yang kedua agama Buddha dengan angka 22,9%. Ketiga terdapat penduduk yang masih bertahan memeluk agama tradisional sebesar 0,8%.

Warga negara Korea Selatan yang menganut agama islam tercatat sekitar 0,2% dan 0,3% penduduk Korea Selatan memilih agama lain. Selain itu, sebagian besar penduduk Korea Selatan juga mengaku tidak memiliki agama seperti yang sudah dijelaskan di atas terdapat 46,4% warga negara Korea Selatan memilih untuk tidak terikat atau tidak memilih agama apapun di mana hal ini merupakan angka yang cukup besar dibandingkan dengan agama-agama lainnya (Faizi 2022). Masyarakat Korea Selatan yang lebih dominan menganut agama Kristen juga erat kaitannya dengan ideologi Konfusianisme. Sehingga, diskriminasi dan ketidaksetaraan gender yang terjadi berbasis agama didorong oleh kepercayaan masyarakat Korea Selatan terhadap ideologi tersebut. Sehingga, agama diartikan sebagai identitas bagi masyarakat Korea Selatan. Hal ini juga disebabkan oleh dorongan Ideologi Konfusianisme yang telah lama melekat di masyarakat Korea Selatan sejak Dinasti Koryo (Halidin 2017).

Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di Korea Selatan pada masa pemerintahan Moon Jae-In kekerasan kultural dalam aspek agama terdapat pada

adanya ajaran konfusianisme di Korea Selatan yang masih mengakar dan menjadibudaya hingga saat ini. Konfusianisme merupakan petunjuk tingkah laku yang berdasarkan moral dan sebagai suatu filsafat atau sikap yang berkaitan dengan manusia dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan atau keharmonisan dalam hidup baik itu dengan alam atau dengan manusia (Chung 2015, 19-21). Pada masa Dinasti Joseon, konfusianisme dijadikan sebagai ideologi resmi dan menjadikan ajaran konfusianisme ini sebagai dasar untuk mengembangkan sistem pendidikan, upacara dan administrasi sipil. Pada masa ini terdapat aturan untuk perempuan yang sangat ketat khususnya dalam lingkungan rumah tangga dan keluarga. Terdapat Tiga Kepatuhan yaitu perempuan saat menjadi anak yang diharuskan mengabdikan pada ayahnya, saat menjadi istri perempuan mengabdikan pada suaminya dan pada saat suaminya meninggal perempuan mengabdikan pada anak laki-laki tertuanya. Selain itu perempuan juga diharuskan menjauhi “Tujuh Kejahatan” yaitu tidak mematuhi mertua, berzina, tidak memiliki anak laki-laki, fitnah, mencuri dan cemburu serta memiliki penyakit turun temurun (Cahyani 2022).

Dalam hal ini jika melihat dari kasus kekerasan terhadap perempuan di Korea Selatan yang berkaitan dengan aspek agama. Korea Selatan sebagai negara maju yang sudah mengalami modernisasi dalam berbagai aspek salah satunya dengan beragamnya agama yang dianut oleh masyarakat Korea Selatan sendiri, namun ajaran konfusianisme masih tetap mengakar dan menimbulkan adanya budaya patriarki yang berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan masyarakat di Korea Selatan yang membuat posisi atau peran perempuan menjadi ter subordinasi dibawah laki-laki. Nilai-nilai konfusianisme ini mengatur perempuan untuk melakukan kegiatan yang feminim dan dibuat untuk

menghormati serta menjaga sistem kekeluargaan yang ideal. Seperti contoh dalam kelompok kristen konservatif yang memiliki pengaruh cukup kuat dalam mempengaruhi pemerintah dengan memperjuangkan atau memperkuat isu moralitas nasional di mana kelompok fundamentalis agama ini memiliki solusi dengan adanya nilai-nilai ketahanan keluarga. Dalam nilai-nilai ketahanan keluarga ini merugikan dan mempersulit perempuan serta mengatur tubuh perempuan yang disebabkan oleh sistem patriarkidan kurangnya pemahaman masyarakat terkait konsep feminisme dan kesetaraan gender yang menyebabkan adanya kesalahpahaman dalam mengartikan konsep feminis. Konsep feminis ini dianggap sebagai egoisme di kalangan perempuan di mana dalam sebuah survei online yang dilakukan oleh *Korean Women's Development Institute* menunjukkan bahwasannya lebih dari separuh pria Korea Selatan yang berusia 20-an memiliki perilaku anti feminis dan terlibat dalam diskriminasi gender melalui ekspresi permusuhan. Selain itu, terdapat beberapa kebijakan pemerintah Korea Selatan yang merampas hak-hak perempuan. Salah satu contohnya ialah adanya larangan aborsi selama 66 tahun dengan ancaman hukuman penjara atau denda sebesar 2 juta won (atau sekitar Rp. 24 Juta).

Oleh karena itu, dalam hal ini gerakan hak-hak perempuan perlu memperhatikan strategi terkait narasi yang disebarkan oleh kelompok fundamentalis agama untuk meredakan kepanikan moral di mana gerakan perempuan ini perlu membuat narasi tandingan yang rasional dan sejalan dengan hak-hak perempuan. Sehingga dapat membangun dan memperkuat aliansi sosial yang dapat mendorong pemerintah dalam memenuhi hak-hak perempuan (Adisya2020). Dalam kasus ini kekerasan kultural dalam aspek agama terdapat nilai-nilai konfusianisme dan nilai-nilai ketahanan keluarga

yang mensubordinasikan perempuan sehingga perempuan di Korea Selatan mengalami kekerasan secara langsung. Berdasarkan penjelasan Galtung kekerasan kultural dapat mengesahkan terjadinya kekerasan langsung dan adanya doktrin agama yang diterapkan dalam hal yang salah, maka nilai-nilai konfusianisme yang ada di Korea Selatan menjadibagian dari adanya kekerasan kultural dalam aspek agama, karena nilai-nilai konfusianisme sebagai suatu system atau aturan yang menyebabkan perempuan di Korea Selatan mengalami diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi secara seksual.

Ideologi konfusianisme telah mengakar kuat di dalam masyarakat Korea Selatan. Konfusianisme pertama kali berkembang di Korea Selatan sejak zaman Tiga Kerasajaan, Dinasti Koryo pada 918M. meskipun sebagian besar masyarakat Korea Selatan atheis atau Kristen, akan tetapi ideologi konfusianisme sangat berpengaruh terhadap struktur sosial sejak abad ke-14. Ideologi Konfusianisme dalam struktur sosial akan membedakan tugas dan peranan antara laki-laki dan perempuan. Di mana, biasanya ideologi ini akan meninggikan laki-laki dalam lingkungan keluarga dan mempunyai otoritas tertinggi. Sehingga, semua anggota keluarga akan melakukan segala yang diperintahkan oleh anak laki-laki tertua tanpa protes. Hal ini berkaitan dengan prinsip Konfusianisme yang ada di Korea Selatan (Ministry Of Culture and Information, 1998: 442). Orang Korea seringkali disebut sebagai penganut ideologi Konfusianisme yang lebih kuat dari orang Tionghoa sendiri. Sehingga, ideologi Konfusianisme menjadi akar kekerasan agama di masyarakat Korea Selatan.

Selanjutnya, berdasarkan tabel terpilih dan tidak terpilih, perempuan di Korea Selatan mendapatkan perlakuan yang tidak adil hanya karena adanya nilai-nilai konfusianisme atau nilai ketahanan keluarga yang menjadikan laki-

laki sebagai seorang yang superior sehingga menyebabkan posisi perempuan di Korea Selatan menjadi ter subordinasi dan mendapatkan perlakuan yang tidak setara dengan laki-laki dalam berbagai aspek. Hal ini merupakan bagian dari kekerasan kultural pada aspek agama sesuai dengan yang telah dijelaskan Galtung dalam tulisannya, bahwa wanita bukan pilihan Tuhan, namun mereka bagian dari setan (Galtung 1990, 297) sehingga perlakuan yang dihadapi perempuan di Korea Selatan merupakan akibat dari adanya ajaran konfusianisme yang masih dilanggengkan dan karena budaya patriarki membuat perempuan menjadi kelas nomor dua di Korea Selatan.

2.2 Kekerasan Terhadap Perempuan di Korea Selatan Dalam Aspek Ideologi

Aspek Ideologi menurut Galtung dalam tulisannya yang berjudul Cultural Violence (1990, 298) ialah ideologi dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pandangan atau persepsi dari manusia itu sendiri. Di mana dalam sebuah negara terdapat ideologi yang dipengaruhi oleh mayoritas ajaran agama dari negara tersebut. Dalam hal ini Galtung menjelaskan dalam tulisannya apabila mengharapkan penerusan agama dalam bentuk ideologi, politik dan Tuhan ialah sebuah negara yang dapat menunjukkan beberapa karakter yang sama. Sama halnya negara dipandang sebagai perpanjangan Tuhan yang memiliki kendali dalam menciptakan kehidupan.

Galtung mengatakan negara sebagai salah satu perpanjangan atau penerus Tuhan di mana negara memiliki hak untuk menciptakan, mengontrol atau bahkan menghancurkan kehidupan dengan menggunakan otoritas yang lebih tinggi dengan mendiskriminasi wanita atau membunuh dilakukan dengan mengatasnamakan bangsa. Di mana bangsa itu sendiri terdiri dari berbagai macam suku, etnis dan bahkan budaya yang sangat beragam. Dalam

tulisannya Galtung memberikan contoh lain dengan adanya kehidupan yang pro aborsi yang berasal dari keputusan kekuasaan negara atas kehidupan dan rasa kesakralan janin, maka orang-orang ini akan cenderung menentang hukuman mati dan marah pada tingkat kematian yang tinggi pada orang kulit hitam di seluruh dunia. Hal ini menjadi suatu jenis kekerasan budaya yang berdasarkan pada penolakan kehidupan janin sebagai manusia, karena lebih memprioritaskan untuk memilih aborsi dan kematian dibandingkan memilih untuk hidup (Galtung 1990, 301-304).

Korea Selatan sebagai negara yang masih kental akan budaya patriarkinyamenjadikan negara ini sebagai negara yang dapat dikatakan sangat mendiskriminasi perempuan di mana hak-hak perempuan sangat dibatasi dan hak-hak atas tubuhnya dilarang. Pada tahun 1953 Korea Selatan merupakan salah satu dari beberapa negara di Asia yang memberlakukan undang-undang yang melarang aborsi atau membatasinya yang ada pada pasal 269 dan 270 KUHP Korea di mana untuk pertama kalinya hukum pidana diterapkan setelah perang korea dan adanya pasal 14 Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak tahun 1973 yang menetapkan system pengecualian terhadap larangan umum. Wanita yang melakukan aborsi akan mendapatkan hukuman hingga satu tahun penjara atau mendapatkan denda hingga 2 juta won (\$ 1.740) selain itu, seorang dokter yang menyediakan layanan aborsi dan dalam proses operasi mengalami cedera akan mendapatkan hukuman 2 tahun penjara dan apabila wanita tersebut meninggal, hukumannya bisa sampai dipenjara dan kehilangan lisensi medisnya dengan penangguhan tujuh tahun (Wolman 2010, 155-157). Namun, dalam undang-undang larangan aborsi tersebut terdapat pengecualian untuk kasus pemerkosaan atau inses, wanita atau pasangannya memiliki penyakit menular

atau penyakit keturunan dan kehamilan yang mungkin membahayakan kesehatan wanita serta apabila wanita sudah menikah tetap membutuhkan izin dari pasangannya untuk menjalani prosedur aborsi ini. Larangan aborsi ini masih tetap diberlakukan hingga saat ini.

Pada April 2019 Mahkamah Konstitusi telah menyatakan membatalkan undang-undang yang melarang aborsi dan Majelis Hakim memerintahkan untuk menyusun undang-undang baru karena larangan aborsi sebelumnya bertentangan dengan konstitusi dan melanggar hak perempuan. Hal ini menjadi suatu perubahan yang baik, karena aborsi diperbolehkan jika janin menunjukkan gejala cacat lahir dan masa kandungannya telah melebihi 24 minggu serta dengan menggunakan obat mifepristone untuk aborsi (“Usulan Pemerintah Korsel” 2020). Namun, dengan adanya undang-undang baru pun masih membatasi hak perempuan yang mana perempuan masih mendapatkan sanksi akibat dari belum fokusnya pemerintah dalam mengatur prosedur aborsi yang aman bagi perempuan. Serta adanya organisasi Uskup Katolik Korea yang masih menganut ideologi yang konservatif sehingga menentang undang-undang baru karena menurut mereka janin atau anak-anak harus dilindungi sejak ia masih di dalam kandungan (SO-YEON 2022).

Dalam hal ini dengan adanya revisi undang-undang terkait larangan aborsi menjadi inkonstitusional dan menjadi undang-undang aborsi terbatas atau restriktif, wanita di Korea Selatan tetap melakukan praktik aborsi ilegal di mana pada tahun 2017 diperkirakan terjadi 49.764 kasus aborsi (Kim 2019). Salah satu contohnya ialah kasus seorang siswa berusia 21 tahun bernama Kim Soo-jin yang melakukan tindakan meminum obat tradisional untuk mengakhiri kehamilannya yang tidak berhasil dan akhirnya Kim telah membuat

suatu pilihan yang sulit untuk melakukan aborsi ilegal, karena belum ada kejelasan terkait prosedur aborsi yang baik dan aman dalam akses perawatan medis untuk perempuan dan janin. Wanita di Korea Selatan tidak mendapatkan hak atas tubuhnya sendiri yang mana dengan adanya kebijakan dan undang-undang yang baru ini pemerintah masih mengatur hidup dan tubuh perempuan.

Dalam hal ini seperti yang dikatakan Galtung bahwa negara sebagai perpanjangan atau penerus tuhan yang memiliki kebijakan untuk mengontrol berdasarkan otoritas negara dengan mengatasnamakan bangsa, di mana pada kasus aborsi di Korea Selatan dengan adanya undang-undang anti aborsi sejak 66 tahun yang lalu larangan ini terpaku pada perlindungan janin tanpa memikirkan perlindungan dan kebutuhan hidup atas janin tersebut setelah lahir dari segi sosial, ekonomi dan kebutuhan lainnya yang mana larangan anti aborsi ini juga sebagai suatu kebijakan yang membatasi reproduksi perempuan. Karena perlu upaya secara fisik, mental dan emosional bagi perempuan itu sendiri untuk mengasuh anak yang dapat menyebabkan berbagai masalah sosial ekonomi dan masalah lainnya setelah anak itu lahir (Work 2017). Jika melihat situasi Korea Selatan dengan budaya patriarki dan seksis dalam membesarkan anak, perempuan sering kali tidak mendapatkan dukungan sehingga menjadikan beban ganda untuk perempuan itu sendiri. Hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan kultural dalam aspek ideologi karena pemerintah mengontrol hak-hak perempuan atas tubuhnya sendiri di mana keputusan tentang aborsi ini seharusnya milik wanita hamil dan menjadi hak perempuan itu sendiri untuk melakukan aborsi atau tidak tanpa harus adanya hukuman dan campur tangan dari pemerintah atau orang lain.

Dalam teorinya Galtung menyebutkan bahwa, negara sebagai perpanjangan Tuhan yang memiliki hak untuk menciptakan, mengontrol, dan menghancurkan kehidupan seseorang dengan otoritas yang lebih tinggi. Maka, Undang-Undang Aborsi yang direvisi menjadi pro-kontra secara ideologi. Hal ini juga menjadi salah satu bentuk kekerasan dalam aspek ideologi, di mana cara berfikir seseorang dapat dipengaruhi. Kekerasan kultural dalam aspek ideologi ini memperlihatkan negara memiliki hak secara penuh untuk melakukan diskriminasi wanita maupun membunuh 'janin' dengan mengatasnamakan negara. Pemberlakuan terhadap Undang-Undang larangan aborsi telah mematikan hak perempuan dalam melahirkan. Akan tetapi, pembaharuan Undang-Undang aborsi juga mematikan hak perempuan. Hal ini dikarenakan, perempuan menggunakan obat *mifepristone* untuk melakukan aborsi dan masih mendapatkan sanksi dari ketidak-amanan prosedur aborsi bagi perempuan. Namun, bagi masyarakat konservatif Undang-Undang aborsi yang telah direvisi menjadi suatu kekerasan kultural. Hal ini dikarenakan, Undang-Undang tersebut dianggap merampas hak untuk hidup janin tersebut. Baik, ideologi secara konservatif maupun modern telah memperlihatkan dampak dari Undang-Undang tersebut telah menimbulkan kekerasan kultural. Di mana, perempuan tidak memiliki hak sepenuhnya atas tubuhnya sendiri. Serta, negara sebagai perpanjangan Tuhan yang memiliki hak penuh untuk mengontrol kehidupan masyarakatnya, terutama perempuan.

BAB III

ANALISIS ASPEK SENI DAN ASPEK KOSMOLOGI DALAM KEKERASAN KULTURAL TERHADAP PEREMPUAN DI KOREA SELATAN PADA MASA PEMERINTAHAN MOON JAE-IN

Pada bab sebelumnya penulis sudah menjelaskan tentang aspek agama dan aspek ideologi, maka pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang analisis bentuk kekerasan dalam aspek seni dan kosmologi. Dengan adanya globalisasi dan modernisasi perempuan di Korea Selatan sudah masuk ke dalam ranah publik, perempuan di Korea Selatan sudah mengalami kemajuan dalam berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan dan industri hiburan di Korea Selatan yang berkembang pesat di berbagai negara di dunia. Namun, isu kekerasan dan pelecehan seksual di Korea Selatan cukup tinggi, hal ini disebabkan oleh faktor budaya patriarki itu sendiri yang telah melekat di masyarakat karena adanya ajaran konfusianisme (Yurisa 2021, 162-164).

3.1 Kekerasan Terhadap Perempuan di Korea Selatan Dalam Aspek Seni

Dalam jurnalnya Galtung menjelaskan aspek seni dengan menghighlight satu poin utama terkait bagaimana Eropa memahami dirinya sendiri sebagai penyangkalan dari lingkungan non-Eropa atau musuh di selatan dan tenggara. Dalam pikiran Eropa untuk mengatasi lingkungan muncul depotisme oriental atau sistem pemerintahan yang sewenang-wenang dan tidak berperasaan. Pangeran Eropa yang berlaku sewenang-wenang seperti membunuh, mencabuli gadis-gadis petani dan tidak dibatasinya kaum Muslim oleh monogami Kristen. Dalam hal ini pangeran memerintah sesuai kemauannya sendiri tanpa melihat hukum. Pada abad ke-19 di Perancis muncul sebuah aliran lukisan dengan latar seks atau kekerasan yang menggambarkan

despotisme oriental. Hal ini pada dasarnya dalam aspek seni bisa menjadi objek kekerasan ketika suatu karya seni tersebut menggambarkan kelompok tertentu dalam konteks yang negatif (Galtung 1990, 305-306).

Di era digital seperti saat ini dengan berkembangnya media hiburan dan platform media sosial yang berbagai macam menjadi sebuah industri kreatif yang dapat dikonsumsi oleh publik dengan cara yang mudah dan cepat serta dapat menjadi salah satu sumber penghasilan. Industri ini memberikan ruang dan kesempatan bagi siapapun untuk berkreasi dalam menunjukkan bakat dan karyanya dengan semenarik mungkin untuk dibagikan dan ditunjukkan kepada masyarakat umum melalui berbagai platform online. Dalam industri ini semua hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dapat dijadikan konten sebagai hiburan, informasi, kesehatan, gaya hidup atau hal-hal lainnya di mana industri ini berhasil membangun suatu konstruksi budayanya sendiri dari budaya yang baik, inovatif dan positif menjadi suatu hal yang seiring perkembangannya dapat menjadi dampak buruk dan menjadi *cyber culture* bagi kaum kapitalis untuk menjual berbagai produk termasuk tubuh perempuan (Oktamala dan Natar 2020, 113-118).

Korea Selatan sebagai negara maju dalam beberapa bidang seperti ekonomi, teknologi dan industri hiburannya yang sangat terkenal dengan K-pop, K-drama dan industri hiburan lainnya. Industri hiburan sangatlah luas dan terkenal serta memiliki dampak yang besar pada budaya populer. Namun, di balik kesuksesan industri hiburan tersebut terdapat kenyataan yang merugikan perempuan di mana perempuan seringkali dijadikan objek seksual dan hanya dinilai berdasarkan penampilan mereka. Salah satu contoh nyata dari hal ini adalah industri K-pop dan K-drama yang sangat populer di Korea Selatan hingga di

seluruh dunia. Dimana dalam industri ini perempuan seringkali mendapatkan berbagai tekanan dan tuntutan untuk memenuhi standar kecantikan yang sangat tinggi dan standar perilaku baik yang sangat ketat. Mereka yang berada di industri ini harus memiliki berat badan dan postur tubuh yang ideal, gigi yang rapi, dagu yang lancip, hidung yang mancung, kulit yang cerah dan penampilan yang menarik ketika mereka tampil di hadapan publik.

Hal ini menyebabkan perempuan seringkali dipaksa untuk melakukan perubahan pada tubuhnya untuk memenuhi standar kecantikan dengan melakukan operasi plastik dan diet ketat yang mana hal ini berdampak pada kesehatan fisik dan mental yang serius bagi perempuan itu sendiri. Seperti yang disebutkan dalam data *Internasional Society Plastic Surgery* tahun 2011 bahwasanya Korea merupakan salah satu negara yang menempati posisi pertama dengan mayoritas penduduknya melakukan operasi plastik pada seluruh bagian tubuh agar mendapatkan tubuh yang ideal. Sosok perempuan di Korea dapat dikatakan memiliki tubuh yang ideal apabila memiliki postur tubuh yang tinggi dan langsing, kulit yang putih, mulus dan kencang. Di mana standar kecantikan ini yang pada akhirnya menjadi ukuran awal dalam menentukan kecantikan seorang perempuan (Mirwan 2021, 12-14).

Dalam industri K-pop khususnya perempuan seringkali mengalami kekerasan dan pelecehan seksual baik itu secara fisik maupun verbal. Menurut WHO dan *World Population Review* tahun 2019, Korea Selatan menjadi negara ke-4 yang mendapatkan peringkat tertinggi dalam resiko bunuh diri akibat banyak faktor yang dialami para aktor ini yang mengganggu kondisi mental dan membuat depresi berat (Shin 2020). Angka bunuh diri di Korea tahun 2018 mencapai 9.1 dari 100.000 orang dengan rentang usia 9 sampai dengan 24 tahun,

hal yang mendorong kaum muda untuk bunuh diri karena beberapa alasan dimana salah satunya ialah penampilan fisik akibat adanya standar kecantikan Korea yang sangat tinggi(Yonhap 2020). Contoh nyata di Korea Selatan sendiri terdapat beberapa kasus yang terkenal termasuk kasus pelecehan seksual dan *cyber bullying* yang dialami oleh penyanyi populer Sulli dan Goo Hara mantan anggota girl band Kara karena komentar jahat dari netizen yang akhirnya membuat dua penyanyi ini bunuh diri pada tahun 2019 (Seo 2019).

Hal ini dilakukan untuk memuaskan publik dan memenuhi kepentingan-kepentingan para pemilik modal tanpa memikirkan akibat panjang yang ditanggung oleh perempuan itu sendiri, perempuan hanya sebagai objek dan korban dari para penguasa dalam industri hiburan. Dalam hal ini Industri K-pop juga dikenal memiliki aturan ketat untuk para bintang mereka, termasuk larangan berkencan, pelatihan sederhana dan perjanjian kontrak yang memposisikan para artis dan agensi mereka secara tidak adil. Dengan budaya patriarki yang ada di Korea Selatan membuktikan kuatnya kekuasaan laki-laki sebagai pemimpin perusahaan untuk menjadikan perempuan sebagai objek yang menguntungkan. Sisi Kapitalisme ini terlihat sangat kuat dalam dunia hiburan Korea, mereka tidak hanya menjual suara para idol melainkan juga menjual wajah dan tubuh mereka. Hal ini justru memicupara aktor atau idol untuk meningkatkan kualitas tampilan tubuhnya untuk mencapai standar kecantikan wanita Korea dengan alternatif-alternatif seperti melakukan operasi plastik, sulam bibir, diet ketat, memutihkan kulit, perbesar bola mata dan lain sebagainya karena mereka merasa tidak percaya diri pada bentuk tubuhnya sendiri (Oktamala dan Natar 2020, 116-119).

Banyaknya kasus dari kalangan artis yang memutuskan untuk mengakhiri

hidupnya sebagai korban *cyber bullying*, pelecehan seksual dari public dan media, serta tuntutan dari industry hiburan telah memperlihatkan bagaimana kekerasan struktural telah mendorong terjadinya kekerasan secara langsung. Bahkan, Korea Selatan merupakan negara industry hiburan yang paling produktif namun menurut WHO dan *World Population Review* Korea Selatan menyandang peringkat tertinggi ke-4 untuk resiko bunuh diri. Selain kalangan artis di dunia hiburan, masyarakat yang tidak berkontribusi dalam dunia industry juga kerap kali menjadi korban kekerasan. Bahkan, tindakan kekerasan, ketidakadilan, dan pelecehan seksual telah menjadi budaya di masyarakat Korea Selatan. Banyaknya korban dari kerasnya tuntutan budaya dan kasus *bullying* berakhir dengan bunuh diri karena mengalami depresi berat. Di mana, budaya masyarakat Korea Selatan yang menekankan kecantikan dan bentuk tubuh ideal terhadap perempuan. Bahkan, industry media memaksakan suatu gambar ideal untuk menjadi patokan yang akhirnya memberikan dampak negative, seperti kekerasan verbal, komentar yang negative hingga standar kecantikan bagi seluruh perempuan di Korea Selatan. Maka, budaya masyarakat Korea Selatan mengenai keidealan akan sesuatu telah mendorong perempuan menjadi korban kekerasan secara langsung dan tidak langsung (Felony Prista Oktamala 2020).

Dalam hal ini seperti yang dikatakan Galtung dalam tulisannya bahwa sebuah karya seni dapat menjadi objek kekerasan ketika menggambarkan kelompok tertentu dalam konteks yang negatif (Galtung 1990, 305). Jika melihat contoh kasus di atas hal ini dapat dikatakan sebagai kekerasan kultural terhadap perempuan pada aspek seni, karena sebagai pelaku seni atau aktor yang berada dalam industry hiburan dituntut untuk memenuhi standar kecantikan dan standar tubuh ideal yang sangat tinggi. Hal ini membuat adanya objektifikasi perempuan dalam

industri hiburan di mana hal ini juga meningkatkan angka kekerasan terhadap perempuan di Korea Selatan menjadi sangat tinggi dan adanya stigma di masyarakat bahwasannya kecantikan dilihat dari bentuk fisik yang sempurna dengan bermacam-macam operasi yang dapat dilakukan.

3.1 Kekerasan Terhadap Perempuan di Korea Selatan Dalam Aspek Kosmologi

Aspek budaya selanjutnya yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan kultural adalah aspek kosmologi. Dalam aspek kosmologi menurut Galtung membawa kembali transisi atau perpindahan dari kekerasan budaya ke budaya kekerasan di mana untuk melihat hal ini secara global dapat dilakukan dengan mengidentifikasi sejumlah aspek budaya yang luas dan beragam serta dirancang untuk melihat asumsi yang lebih dalam tentang realita. Konsep kosmologi sebagai aspek yang melihat sesuatu dari dasar asal mula atau akar dari kemunculan hal tersebut, di mana hal ini dilakukan untuk melihat lebih jauh dari kenyataan tersebut serta dapat menentukan apa yang terjadi secara normal dan alami. Galtung juga menjelaskan bahwasanya seluruh budaya memiliki potensi dalam menimbulkan tindak kekerasan yang dapat dinyatakan pada tingkat budaya yang lebih nyata dan kemudian digunakan untuk membenarkan sesuatu yang tidak benar atau tidak adil (Galtung 1990, 301).

Dalam kasus kekerasan kultural yang disebabkan oleh kosmologi, dapat dilihat dari adanya ajaran konfusianisme yang sangat melekat di dalam kehidupan masyarakat Korea Selatan. Ajaran konfusianisme ini sudah ada sejak zaman Dinasti Joseon, sebagai prinsip moral dan etika dalam bersosialisasi di masyarakat. Ajaran ini mempengaruhi etika, pemikiran, sistem politik, struktur sosial dan cara hidup orang Korea. Konfusianisme berpusat pada tiga lingkungan yaitu diri sendiri, lingkungan keluarga dan negara di mana ketiganya merupakan sesuatu yang saling berhubungan atau keterkaitan. Dalam etika konfusianisme terdapat “Lima Hubungan” (hubungan orang tua-anak, suami-istri, saudara kandung, teman-teman dan atasan dengan bawahan) hal ini sebagai dasar timbal balik untuk menjaga hubungan antar manusia yang tertib dan harmonis (Chung 2015, 76-81). Selain itu terdapat aturan bagi perempuan untuk

mengikuti “Tiga Kepatuhan” yaitu mematuhi ayah, suami dan anak laki-laki mereka sepanjang hidupnya dan perempuan di Korea Selatan harus menjauhi Tujuh Kejahatan apabila tidak mempunyai anak laki-laki, tidak mematuhi mertua, memiliki penyakit turun temurun, berzina, fitnah, cemburu dan mencuri. Perempuan diharuskan hanya menikah satu kali seumur hidup karena pernikahan dianggap sebagai suatu hal yang sakral bagi kaum perempuan dan setelah menikah perempuan harus fokus mengurus urusan rumah tangga, kelurgaan membesarkan anak (Cahyani 2022).

Dalam hal ini walaupun Korea Selatan sudah bangkit dengan pertumbuhan ekonominya yang begitu pesat dan menjadi negara maju, ajaran konfusianisme masih mengakar dan memberikan perubahan di berbagai aspek kehidupan salah satunya tatanan nilai dalam masyarakat Korea di mana nilai-nilai ini menjadi sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Korea. Nilai-nilai konfusianisme dan adanya budaya patriarki yang masih mengakar di Korea Selatan membuat perempuan mengalami diskriminasi dalam beberapa aspek kehidupan. Dalam lingkungan keluarga, peran perempuan hanya terbatas pada pekerjaan domestik dan mereka hanya diajari tentang keutamaan subordinasi dan ketahanan atas peran mereka menjadi istri dan ibu untuk mengurus rumah. Laki-laki di Korea Selatan diberikan lebih banyak hak dan perannya dibandingkan perempuan. Salah satunya peran laki-laki dalam keluarga menjadi lebih tinggi dan memiliki otoritas penuh dalam memimpin keluarga (Midha, Kaur and Niveditha 2018, 351). Hal ini memicu tindak kekerasan terhadap perempuan, berdasarkan studi tahun 2021 yang dilakukan Institute Pengembangan Perempuan Korea melalui survei dari 7.000 perempuan dewasa, 1.124 perempuan pernah mengalami kekerasan seksual secara fisik dan emosional oleh pasangannya atau bahkan mantan pasangannya (Se-jin 2022). Dalam kasus perceraian, laki-laki dapat menceraikan istrinya apabila perempuan tersebut mandul atau menderita penyakit dan

tidak patuh pada suaminya, hukum Korea juga memberikan hak asuh khususnya bagi anak laki-laki diberikan kepada ayahnya. Selain itu, banyak kasus pemerkosaan dibatalkan karena penuntutan di dominasi oleh laki-laki (Midha, Kaur and Niveditha 2018, 348-350).

Hal ini menjadi relevan dengan adanya nilai-nilai konfusianisme terkait Tiga Kepatuhan dan Tujuh Kejahatan. Walaupun Korea Selatan sudah menjadi negara yang modern namun ajaran konfusianisme masih melekat dan menjadi salah satu pedoman yang diterapkan oleh masyarakat Korea Selatan hingga saat ini, karena laki-laki memiliki kesempatan dan mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari pada perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan tidak hanya terjadi dalam lingkungan keluarga melainkan dalam ranah publik khususnya pada lingkungan kerja, perempuan masih mengalami diskriminasi di mana Korea Selatan sebagai negara dengan PDB terbesar ke 11 di dunia tetapi memiliki kesenjangan gender yang cukup tinggi terkait partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Menurut World Economic Forum terkait partisipasi ekonomi dan peluang bagi perempuan, Korea Selatan memiliki kesenjangan upah gender tertinggi yang berada di peringkat 102 dari 156 di antara negara-negara OECD lainnya (Larasati 2022).

Terdapat banyak faktor yang memengaruhi perempuan di Korea Selatan kurang berperan dalam angkatan kerja. Salah satu faktornya adalah adanya budaya perusahaan yang patriarki dan misogini. Di mana ketika perempuan hamil atau sudah memiliki anak, seorang perempuan tidak mendapatkan cuti hamil dan perusahaan menganggap jika mempekerjakan perempuan merupakan suatu beban bagi perusahaan itu sendiri karena jika sedang hamil dan jika perempuan sudah memiliki anak tidak bisa bekerja secara maksimal untuk perusahaan, selain itu karyawan dituntut untuk mempererat hubungan antara atasan dengan bawahan di mana budaya konfusianisme ini masih

diterapkan dan menjadi penyebab adanya tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan, contohnya ketika merayakan makan atau minum bersama dengan rekan kerja dan setelah acara tersebut biasanya atasan mereka memaksa rekan kerja perempuannya untuk pulang bersama dengan tujuan lain yang berujung pelecehan atau pemerkosaan yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Hal ini menjadi budaya dalam lingkungan kerja. Lima hubungan dalam ajaran konfusianisme ini menjadi dimaklumi dan dianggap sebuah nilai yang perlu dijaga, dalam kasus ini terdapat anggapan bahwasannya menjaga hubungan antara atasan dan bawahan menjadi salah satu hubungan yang perlu dijaga dan sudah menjadi budaya kerja sehingga hal ini tidak dianggap sebagai sikap kekerasan dan pelecehan seksual.

Sistem nilai atau tradisi konfusianisme ini bertahan hingga saat ini dan berkembang menjadi dimensi struktural yang menyulitkan perempuan untuk dapat dihormati dan dihargai untuk dapat setara dengan laki-laki, karena posisi dan peran perempuan selalu dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki ditambah dengan adanya diskriminasi dan budaya patriarki yang sudah mengakar membuat kesetaraan tersebut sulit untuk direalisasikan, karena hal ini seperti yang dikatakan Galtung bahwasannya dalam aspek kosmologi kekerasan muncul dari sesuatu yang sudah mengakar (Galtung 1990, 308). Dalam hal ini dengan adanya budaya patriarki di Korea Selatan yang sudah ada sejak dahulu para korban khususnya perempuan di Korea Selatan menganggap nilai-nilai dalam ajaran Konfusianisme ini menjadi hal yang wajar dan sudah menjadi landasan atau dasar dalam menaati kehidupan di Korea Selatan. Sehingga hal ini menimbulkan kekerasan baik itu di dalam keluarga, di lingkungan kerja atau bahkan di ranah publik yang lebih luas.

Aspek ini melihat bahwa, penentuan sesuatu dapat terjadi karena suatu hal yang

normal dan sebuah proses yang alami. Maka, diskriminasi dan kekerasan kultural yang terjadi terhadap perempuan Korea Selatan disebabkan oleh proses alami yang telah terbentuk sebelumnya. Selaras dengan proses penjajahan Korea Selatan yang merupakan sebab awal munculnya kekerasan, baik secara langsung, struktural, hingga kultural. 35 tahun masa penjajahan Korea Selatan yang dilakukan oleh Jepang telah menyebabkan berbagai ketimpangan dan penjajahan bagi masyarakat Korea Selatan, terutama perempuan. Represi militer, pekerja paksa, hingga pelecehan terhadap puluhan ribu perempuan Korea menyebabnya berkembangnya diskriminasi perempuan di Korea Selatan hingga saat ini. Permasalahan perempuan menjadi permasalahan global di banyak negara, tidak terkecuali di negara Korea Selatan. Selaras dengan aspek kosmologi, maka penjajahan Jepang menjadi awal mula (suatu proses alami) yang menyebabkan lahirnya ketimpangan perempuan dan perempuan terpinggirkan, serta tidak mendapatkan hak-hak secara layak. Hingga hari ini, tatanan masyarakat masih menganggap bahwa, perempuan memiliki posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Bangkitnya Korea Selatan dari keterpurukan menjadi negara maju yang berkembang sangat cepat dalam beberapa aspek kehidupan, membuat masyarakat Korea menjadi lebih mudah dalam menjalani kehidupan saat ini. Namun, dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan negara yang begitu pesat, isu kekerasan di Korea Selatan menjadi salah satu masalah yang serius di Korea Selatan. Isu ini merupakan suatu hal yang marak dan sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini isu kekerasan terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Korban kekerasan juga banyak dialami khususnya kepada perempuan. Menurut data kasus kekerasan seksual dari *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dari tahun 2013-2020 kasus kekerasan seksual di Korea Selatan terus mengalami peningkatan (Jung-Youn 2022). Hal ini karena adanya pandangan tradisional dan sistem tata nilai di masyarakat yang menganggap bahwa perempuan sebagai suatu barang yang dapat dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak atau bahkan dijadikan objek seksual oleh kaum laki-laki, dimana adanya budaya patriarki yang masih mengakar dan nilai-nilai konfusianisme yang juga masih di terapkan hingga saat ini.

Budaya patriarki dan nilai-nilai konfusianisme atau ajaran tradisional ini menjadi sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Korea dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dari lingkungan terkecil seperti keluarga maupun lingkungan yang lebih luas seperti kehidupan sosial bermasyarakat di Korea Selatan. Hal ini membuat timbulnya suatu bentuk kekerasan khususnya kekerasan terhadap perempuan. Perempuan di Korea Selatan menjadi korban kekerasan akibat adanya subordinasi dan misogini dari adanya budaya patriarki, sehingga perempuan di sana

kerap sekali mendapatkan perlakuan yang tidak sebanding dengan laki-laki.

Menurut Galtung dalam konsepnya terdapat tiga bentuk kekerasan yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural dan kekerasan kultural. Ketiga konsep ini memiliki pengertian yang berbeda tetapi masih berkaitan satu dengan yang lainnya. Berbicara mengenai kekerasan yang dialami perempuan di Korea Selatan, kekerasan ini termasuk ke dalam kekerasan kultural John Galtung. Kekerasan kultural merupakan suatu sikap yang berlaku atau keyakinan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan kekerasan dan kekuasaan yang telah diajarkan sejak kecil dan berkaitan dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya pemanfaatan nilai-nilai budaya dan sejarah masa lalu sebagai salah satu alasan dari adanya tindakan yang menimbulkan kekerasan langsung dan kekerasan struktural (Eriyanti 2017, 4-6). Dalam penelitian ini terdapat empat aspek yang digunakan yaitu aspek agama, aspek ideologi, aspek seni dan aspek kosmologi.

Dalam aspek agama kasus kekerasan terhadap perempuan di Korea Selatan ini terdapat pada adanya ajaran konfusianisme yang masih mengakar dimana adanya nilai-nilai konfusianisme ini mengatur perempuan untuk melakukan kegiatan yang feminim dan dibuat untuk menghormati serta menjaga sistem kekeluargaan yang ideal, contohnya seperti dalam kelompok kristen konservatif yang memiliki pengaruh cukup kuat dalam mempengaruhi pemerintah dengan memperjuangkan atau memperkuat isu moralitas nasional di mana kelompok fundamentalis agama ini memiliki solusi dengan adanya nilai-nilai ketahanan keluarga. nilai-nilai ini yang membuat perempuan tersubordinasi dan mengalami kekerasan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam kasus ini berdasarkan penjelasan Galtung kekerasan kultural dapat mengesahkan terjadinya kekerasan langsung dan adanya doktrin agama yang diterapkan dalam hal yang salah, maka nilai-nilai konfusianisme

yang ada di Korea Selatan menjadi bagian dari adanya kekerasan kultural dalam aspek agama, karena nilai-nilai konfusianisme sebagai suatu system atau aturan yang menyebabkan perempuan di Korea Selatan mengalami diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi secara seksual.

Dalam aspek ideologi menurut Galtung negara sebagai perpanjangan atau penerus tuhan di mana negara memiliki hak untuk mendiskriminasi atau mengontrol sesuatu menggunakan otoritasnya dalam menghancurkan kehidupan dengan mengatasnamakan bangsa, dalam penelitian ini contohnya ialah adanya kebijakan dari pemerintah yang berkaitan dengan undang-undang anti aborsi dimana dalam undang-undang ini wanita yang melakukan aborsi akan mendapatkan hukuman hingga satu tahun penjara dan mendapatkan denda hingga 2 juta won. Oleh karena itu, banyak perempuan yang melakukan aborsi illegal karena perempuan merasa haknya dibatasi dan mendapatkan perlakuan diskriminasi sehingga perempuan tidak mendapatkan hak atas tubuhnya sendiri.

Dalam aspek seni Galtung menjelaskan adanya suatu karya yang menggambarkan kelompok tertentu dalam konteks yang negatif dimana dalam hal Korea Selatan dengan industri hiburannya yang semakin berkembang membuat adanya konstruksi budaya yang merugikan perempuan karena perempuan dijadikan sebagai objek seksual dan sesuatu yang dapat di jual. Industri ini tidak hanya menjual karya seniman itu sendiri melainkan dinilai berdasarkan penampilan mereka sehingga perempuan yang tergabung dalam industri ini seringkali mendapatkan beragam tekanan dan tuntutan untuk memenuhi standar kecantikan yang mengharuskan perempuan untuk memiliki postur tubuh yang ideal, kulit yang putih cerah dan penampilan yang menarik. Dengan masih mengakarnya budaya patriarki yang ada di Korea Selatan dalam kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan kultural terhadap

perempuan di Korea Selatan masih terus terjadi karena dengan adanya standar kecantikan ini membuat perempuan menjadi tertekan dan di diskriminasi sehingga angka bunuh diri Korea Selatan menjadi tinggi hingga mencapai 9.1 dari 100.000 dengan rata-rata usia 9-24 tahun.

Kemudian dalam aspek kosmologi menurut Galtung kekerasan muncul dari adanya sesuatu yang sudah ada sejak dahulu atau sudah mengakar. Jika melihat kekerasan terhadap perempuan di Korea Selatan disebabkan karena masih tertanamnya nilai-nilai konfusianisme yang sudah ada sejak dahulu dan masih melekat hingga saat ini. Nilai-nilai konfusianisme mengajarkan budaya tradisional dan budaya patriarki di Korea Selatan yang sangat mendiskriminasi perempuan, ruang gerak perempuan menjadi sangat terbatas dalam keluarga sedangkan dalam ranah publik perempuan menjadi merasa tidak aman karena di beberapa fasilitas umum seperti misalnya pada toilet umum terdapat banyak kamera pengintai yang sangat kecil dimana hal ini merekam aktivitas yang dilakukan perempuan di kamar mandi dan oleh beberapa oknum video melalui kamera pengintai tersebut disebarluaskan atau bahkan diperjual belikan sehingga perempuan mengalami kekerasan digital dan pelecehan seksual secara tidak langsung. Selain itu, dalam ranah pekerjaan yang dapat dikatakan sebagai sebuah instansi formal perempuan masih mengalami diskriminasi karena kesenjangan upah dan kedudukan atau jabatan dalam perusahaan tersebut, hal ini karena adanya ajaran konfusianisme dan budaya patriarki ini yang membuat perempuan mengalami kekerasan kultural.

Kemudian kekerasan kultural terhadap perempuan di Korea Selatan menjadi relevan dengan keempat aspek Galtung karena masih mengakarnya ajaran konfusianisme dan budaya patriarki di Korea Selatan. Nilai-nilai konfusianisme dan budaya patriarki yang sudah ada sejak dahulu masih menjadi sebuah pedoman

masyarakat Korea Selatan dalam menjalankan kehidupan hingga saat ini, kasus kekerasan di Korea Selatan pada tahun 2016-2020 atau pada masa pemerintahan Moon Jae-In pun mengalami peningkatan. Terdapat banyak kasus atau aturan yang mendiskriminasi perempuan dimana hal ini menimbulkan adanya kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga terjadinya kekerasan kultural.

4.2 Rekomendasi

Dalam penelitian ini penulis hanya terbatas pada isu kekerasan kultural menurut John Galtung terhadap perempuan di Korea Selatan dengan melihat empat aspek yang relevan yaitu aspek agama, ideologi, seni dan kosmologi. Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat oleh penulis, tentunya penelitian ini masih mempunyai keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Namun, penelitian ini menjadi penting karena penulis berharap dapat memotivasi peneliti lain dengan membuat penelitian lanjutan mengenai isu-isu kekerasan lain terhadap perempuan di Korea Selatan dengan lebih dalam, menggunakan metode dan teori yang berbeda seperti menggunakan konsep kekerasan langsung dan kekerasan struktural serta dapat mengambil fokus yang lebih luas dari penelitian ini. Karena setiap tahunnya pasti akan ada perkembangan topik dalam penelitian ini. Sehingga harapannya untuk penelitian selanjutnya dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adisya, Elma. 2020. *Hiw South Korea's Religious Fundamentalists Influence Its Politics* . Magdalene.

Chung, Edward YJ. 2015. *Korean Confucianism: Tradition and Modernity*. Korea: The Academy of Korean Studies Press. 2022.

Ismail Suardi Wekke, dkk. 2019. *METODE PENELITIAN SOSIAL*. Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku (group Penerbit CV. Adi Karya Mandiri).

Jurnal

Aanchal Midha, Savreen Kaur, Niveditha.S. 2018. "Confucianism and Changing Gender Roles." *International Journal of Advance Research, Ideas and Innovations in Technology Volume 4* 347-352.

Anggih, Maharani dan. 2022. "MENINJAU KEBERHASILAN MOON JAE-IN SEBAGAI PRESIDEN KOREA SELATAN." *Geoscience* 1-17.

AR, Eka Hendry. 2008. "KEKERASAN DALAM PENDIDIKAN." *ATURATS, Vol.3 Nomor 1* 15-22.

Burhan, Citra Cahyaning Sumirat dan Amelia. 2013. "PENGARUH AJARAN KONFUSIANISME TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN DI KOREA SELATAN ." 1-15.

Eriyanti, Linda Dwi. 2017. "Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme ." *Jurnal Hubungan Internasional Vol. 6 No. 1* 1-11.

- Galtung, Johan. 1990. "Cultural Violence." *Journal of Peace Research*, vol. 27, no.3 291-305.
- Jae Yop Kim, Sehun Oh dan Seok In Nam. 2016. "Prevalence and Trends in Domestic Violence in South Korea: Findings From National Surveys." *Journal of Internasional Violence Vol. 31* 1555-1573.
- Kusuma, Koko Sadewo & Rina Sari. 2020. "Perlawanan Perempuan terhadap Kekerasan dalam Berpacaran di Video Musik K-Pop." *Ilmu Komunikasi Volume 17, Nomor 1* 1-18.
- Ladyanna, Sonezza. 2013. "RUANG PUBLIK DAN PEREMPUAN DI KOREA SELATAN." *Jurnal Kajian Gender Muwazah Volume 5, Nomor 1* 42-53.
- Lee, Chiyong Cha dan Mi-ran. 2021. "Healing From Sexual Violence Among Young Women In South Korea ." *International Journal of Mental Health Nursing* 2-11.
- Maharani, Anggih dan. 2022. "MENINJAU KEBERHASILAN MOON JAE-IN SEBAGAI PRESIDEN KOREA." - 15.
- Meilanesia, Sundari. 2021. "DAMPAK GERAKAN #METOO DI KOREA SELATAN PADA TAHUN 2018-2020." *JOM FISIP Vol. 8: Edisi II Juli- Desember* 1-15.
- Mirwan, Nurwahyuni. 2021. "Perempuan dan Kontestasi Kecantikan: Analisis Konstruksi Citra dalam Bingkai Media ." *Najwa: Jurnal Muslimah dan Studi Gender Vol. 1, No. 1* 1-23.
- Natar, Felony Prista Oktamala dan Asnath Niwa. 2020. "Kekerasan Terhadap

Perempuan di Balik Industri Hiburan." *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia Vol. 1, No. 2* 112-126.

Rosyida, Oktavia Widya Kumalasari dan Hamdan Nafiatur. 2022. "Upaya Korea Women's Association United Dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender di Ranah Politik Korea Selatan." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 288-300.

Sitompul, Lola Utama. 2021. "Sexist Hate Speech Terhadap Perempuan di Media: Perwujudan Patriarki di Ruang Publik ." *Jurnal Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan Volume 3 Nomor 3* 152-161.

Utami Zahirah Noviani P, Rifdah Arifah K, Cecep dan Sahadi Humaedi. 2018. "MENGATASI DAN MENCEGAH TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DENGAN PELATIHAN ASERTIF." *Jurnal Penelitian & PPM Vol 5 No 1* 49-55.

Wolman, Andrew. 2010. "Abortion in Korea: A Human Rights Perspective on the Current Debate Over Enforcement of the Laws Prohibiting Abortion." *Jurnal of International Business and Law Volume 9* 155-157.

Work, Clint. 2017. *Taboo No More? Abortion in South Korea*. The Diplomat.

Yurisa, Kardina dan Anisa Marlinda. 2021. "Analisis Gender Based Violence dalam Konvensi Cedaw pada Isu Kekerasan Seksual di Korea Selatan." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Volume 1, Nomor 2* 156-170.

Artikel Media Massa

Angelica, Desiree Junike. 2022. *Presiden Baru Korea Selatan dan Kebijakan Anti-Feminismenya*. Kumparan.com.

- Arin, Kim. 2022. *Not illegal but not legal: The murky landscape of abortion in Korea*. The Korea Herald.
- Asmardika, Rahman. 2021. *Divonis 22 Tahun Penjara, Eks Presiden Korsel Park Geun-hye Diberi Pengampunan Pemerintah*. International, Seoul: Okezone News .
- ATARA, VALENTINE PEBRINA FRISCILA. 2020. *Konstruksi Sosial Budaya dan Ketidakadilan Gender di Korea Selatan*. Center for Area Studies Indonesian Institute of Sciences (P2W-LIPI).
- Cahyani, Mutiara Gita. 2022. *Perempuan dan Perannya Pada Zaman Dinasti Joseon di Korea Selatan*. kumparan.com.
- CIA *The World Factbook*. Oktober 31. Accessed November 07, 2022. <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/korea-south/>.
- Dayana, Anggit Setiani. 2019. *Kim Ji-young, Born 1982 & Diskriminasi Perempuan Korea Selatan*. tirto.id.
- Faizi, Lutfan. 2022. *Agama Warga Negara Korea Selatan dan Persentasenya*. International, Jakarta : sindonews.com.
- Gita, Cahyani dan Mutiara. 2022. *Perempuan dan Perannya Pada Zaman Dinasti Joseon di Korea Selatan*. kumparan.com.
- Gyeong-Eun Heo, Jae Hong Sang, Tae-Hee Kim dan Hae Hyeog Lee. 2022. "An Analysis of Women Victims of Sexual Violence in One Area in Republic of Korea ." 2-9.2020.
- Inilah Usulan Pemerintah Korsel Terkait RUU Aborsi*. internasional, mediaindonesia.com.

Jang Soo-kyung, Park Hyun-jung and Jung Hwan-bong. 2018. *Women gather to protest biased investigations into hidden-camera incidents*. HANI.CO.KR.

Jung-Youn, Lee. 2022. *6 dari 10 kejahatan seks digital di Korea Selatan ditemukan menargetkan anak di bawah umur: data pemerintah Korea Selatan*. Seoul:Asia News Network.

Kim, Victoria. 2019. *South Korea abortion ban is unconstitutional, top court rules*. World and Nation , Seoul: Los Angeles Times.

Korean Cultural Center . 2011. *Korean Cultural Center* . Juli 18. Accessed Oktober 16, 2022. <https://id.korean-culture.org/id/139/korea/39#mnu1>.

Larasati. 2022. *Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan di Korea Selatan*. kumparan.com.

Park, Boon Jin. n.d. "Patriarchy in Korean Society: Substance and Appearance of Power ." 43-55. 2017. *Rakyat Korsel memilih presiden beraliran liberal, Moon Jae-in*. BBC.

Reditya, Tito Hilmawan. 2021. *Profil Pemimpin Dunia: Moon Jae In, Presiden Korea Selatan*. KOMPAS.com.

Schieber, Olivia. 2020. *foreignpolicy.com*. Agustus 10. Accessed Desember 29, 2022. <https://foreignpolicy.com/2020/08/10/south-korea-needs-to-contend-with-sexual-violence/>.

Se-jin, O. 2022. *46% of cases of violence against women in Korea perpetrated by intimate partner, study finds*. HANKYOREH HANI.CO.KR.

Seo, Julia Hollingsworth dan Yoonjung. 2019. *Death of K-pop star Sulli*

prompts outpouring of grief and questions over cyber-bullying. Seoul:
CNN .

Shin, Andrew Salmon dan Mitch. 2020. *Why South Korean Kill Themselves.* Seoul:
asiatimes.com.

Smith, Joyce Lee dan Josh. 2019. *South Korea court strikes down abortion law
in landmark ruling.* Healthcare and Pharma, Seoul: Reuters.

SO-YEON, YOON. 2022. *[WHY] Korea decriminalized abortion, but has anything
actually changed?* Korea JoongAng Daily .

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). n.d. *United Nations
Office on Drugs and Crime (UNODC).* Accessed 08 30, 2022.
<https://dataunodc.un.org/data/crime/sexual-violence>.

Yamanaka, Karen. 2022. "Abortion Rights." *Defend abortion rights and
abolish anti-abortion law in East Asia,* Juni 8.

Yonhap. 2020. *Suicide remains leading cause of death for S. Korean teens,
youths.* Koreaherald.com.